

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KONFLIK LAUT CHINA SELATAN 2021-2023

Feri Muhammad Ali Akbar¹, Arry Bainus², Darmansjah Djumala³
¹²³Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Padjadjaran
¹feri22002@mail.unpad.ac.id, ²arrybainus@unpad.ac.id,
³darmansyah.djumala@unpad.ac.id

Abstract

The South China Sea conflict has always been an issue in international affairs. China's unilateral claim to the nine-dash line in the waters of the South China Sea has created various dynamics. The polemics come both from countries that directly intersect with the South China Sea, or from countries that are far from the waters of the South China Sea like the United States. The foreign policy of the United States in intervening in the South China Sea conflict is inseparable from its national interests.

Keywords: Conflict, South China Sea, China, United States

PENDAHULUAN

Amerika Serikat memiliki peran utama dalam setiap lini hubungan Internasional. Sebagai negara adidaya, kekuatan Amerika Serikat cukup sulit ditandingi oleh negara lain. Kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat merupakan kekuatan yang dominan di dunia internasional. Salah satu bukti dominasi Amerika Serikat di dunia internasional dengan menunjukkan besarnya distribusi produk Amerika serta kekuatan militernya di berbagai Kawasan. Amerika Serikat memiliki pangkalan militer terbanyak di berbagai daerah. Amerika Serikat melakukan kebijakan luar negeri dengan menempatkan militer yang jauh dari teritorialnya, untuk tetap melanggengkan kekuasaannya di dunia internasional. Amerika Serikat memiliki tujuh prioritas kebijakan, poin terakhir dari kebijakan tersebut merupakan manifestasi dalam memperkuat kembali kedudukan dan keamanan nasional Amerika Serikat di internasional (Priorities | The White House). Salah satu bentuknya dengan Amerika Serikat menjadi negara yang paling kuat dalam militer dengan aliansi-aliansi yang dimilikinya. Latihan bersama dan menempatkan militernya di Asia Pasifik merupakan bentuk Amerika Serikat sebagai polisi dunia dan bentuk kekuatan bahwa negaranya

dapat mengintervensi masalah di wilayah lain, salah satunya Laut China Selatan.

Konflik Laut China Selatan menjadi isu yang cukup sering dibicarakan. Konflik Laut China Selatan terjadi dengan berbagai aktor negara di dalamnya. Laut China Selatan menjadi daerah yang potensial menjadi pertikaian bagi beberapa negara. Konflik di Laut China Selatan terjadi tidak terlepas dari potensi luar biasa baik dari bawah maupun atas laut. Potensi tersebut tentu tidak disia-siakan oleh dua kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan China. Laut China Selatan merupakan laut marginal yang terletak di Samudra Pasifik. Wilayah ini memiliki perhatian dengan kondisi geopolitik yang strategis. Secara historical jalur Laut China Selatan menjadi wilayah yang vital bagi perdagangan penting, China, Asia Tenggara, serta jalur menuju India dan daerah barat lainnya.

Laut China Selatan menjadi perairan tersibuk dalam jalur pelayaran di dunia. Menguasai Laut China Selatan memiliki arti menguasai jalur perdagangan yang cukup besar, dan akan meningkatkan kekuasaan ekonomi negara. Laut China Selatan menjadi alasan logis pertemuan antara dua kekuatan besar Amerika Serikat selain jalur penting yang dilalui perdagangan, Laut China Selatan menyimpan potensi sumber daya alam. Cadangan minyak dan gas alam yang ada di Laut China Selatan tercatat 17,7 miliar ton melebihi Kuwait yang tercatat sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar (Matondang et al., 2022). Laut China Selatan memiliki nilai secara ekonomi, politis, dan strategis dalam sistem laut internasional. Ditambah Laut China Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang jumlahnya mencapai ratusan. Kekayaan Laut China Selatan dapat dibuktikan dari berbagai sudut pandang yang ada

Laut China Selatan selalu menjadi pantauan bagi negara China yang ingin menguasai perairan tersebut. China mengklaim memiliki perairan Laut China Selatan, dengan *Nine Dash Line* atau sembilan garis putus-putus atas dasar merupakan warisan leluhurnya. Klaim sepihak dari China tersebut menyebabkan singgungan dengan berbagai negara seperti Vietnam,

Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Termasuk juga Indonesia, Perairan Natuna tidak luput dari klaim sepihak bagi China, sehingga munculnya nelayan tradisional China dengan bebas di perairan Nusantara (Ruyat, 2017).

Dua kekuatan besar Amerika Serikat dan China hadir di wilayah sengketa Laut China Selatan. Tidak hanya hubungan konflik antara Amerika Serikat dan China, keduanya memiliki intensitas kedekatan dalam berbagai kerjasama. Salah satunya dalam hal perekonomian, sebagai eksportir nomor dua di dunia, Amerika Serikat memiliki kerjasama dengan lebih dari 200 negara dan berbagai Kawasan wilayah. Grafik ekspor yang dilakukan Amerika Serikat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, ketika tahun 2021 menuju tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 17,5 %. Amerika Serikat melakukan ekspor terbesar kepada Kanada, Meksiko, China, Jepang, dan Inggris, serta kawasan regional Uni Eropa. Amerika Serikat juga berada pada posisi pertama sebagai importir. China menjadi urutan yang pertama sebagai supplier barang import bagi Amerika Serikat. Tidak hanya dalam perkara produk barang Amerika Serikat dan China melakukan interaksi ekonomi, melainkan keduanya melakukan ekspor dan impor terkait jasa. Hubungan kedua negara dalam perekonomian saling mendominasi dan harmonis (Countries & Regions | United States Trade Representative).

Dibalik keharmonisan kedua negara antara Amerika Serikat dan China, keduanya tetap ingin mendominasi sebagai negara kuat di dunia. Terbukti dalam perekonomian, Amerika Serikat tidak tinggal diam dengan China sebagai suplayer terbesar bagi negaranya. Amerika Serikat melakukan inisiatif untuk mengurangi rantai pasokan dari negara China, dengan menggunakan insentif pemerintah serta kebijakan pajak, serta meningkatkan produksi negaranya. Amerika Serikat tidak membiarkan China melanggengkan dominasi kekuasaannya di dunia internasional (Menteri Perdagangan AS Kunjungi China, Bahas Upaya Peningkatan Bisnis).

China termasuk negara yang mendominasi perekonomian, baik dengan negara maju maupun dengan negara berkembang. Hubungan bilateral

antara China dan Indonesia terjadi dengan harmonis. Kedua negara mengalami peningkatan ekonomi akibat kerjasama yang dilaksanakan, baik itu perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Kedua belah pihak baik dari Indonesia maupun China, sudah menandatangani beberapa perjanjian bersama. Perjanjian kerjasama ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi China, kerjasama antara Menteri BUMN dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi China, Kerjasama antara BASARNAS dengan Menteri Transportasi China, kerjasama antara Pemerintah RI dengan Pemerintah China dalam upaya pencegahan pajak berganda, serta penjanjian kerjasama antara Lembaga Pengembangan Antariska Nasional dengan Badan Antariksa Nasional China. Selain itu Pemerintah Indonesia dan China telah memiliki kesepakatan untuk mensinergikan gagasan poros maritim dunia (Putri et al.). Kerjasama tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan China menunjukan hubungan yang harmonis. Terlebih kerjasama yang sangat disadari oleh masyarakat Indonesia terhadap China, yakni KCIC (Kereta Cepat Indonesia China).

Posisi China semakin memperkuat pengaruhnya di Indonesia, bahkan bisa dilihat lebih mendominasi dari Amerika Serikat. Sebagai hegemoni dan *major power* Amerika Serikat tidak tinggal diam, Amerika Serikat tidak ingin kehilangan pengaruhnya di Asean terkhusus Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya pasukan Amerika Serikat dalam perairan Laut China Selatan (Pengaruh Tiongkok Dan Amerika Serikat Di Laut China Selatan Serta Dampaknya Terhadap Indonesia,).

PEMBAHASAN

China mengakui perairan Laut China Selatan berdasarkan sejarah yang dimiliki dengan meyakini bahwa perairan tersebut merupakan warisan dari leluhurnya. Pernyataan dari China tersebut bertentangan dengan aturan yang dipegang oleh negara-negara Asean, bahkan dalam aturan internasional. Pertentangan China dengan negara yang bersinggungan dengan Laut China Selatan, tidak mengurangi harmonisnya hubungan China dengan negara lain, termasuk Indonesia. Kedekatan China dan Indonesia

dalam aspek ekonomi tentu sangat kuat. Melihat kekuatan China saat ini dapat mengusik kekuatan Amerika Serikat, di daerah Asia Tenggara.

Perhatian internasional hadir terhadap perairan Laut China Selatan, dimana klaim individu China menjadi celah masuknya kekuatan lain untuk turun andil dalam permasalahan ini. Konflik maritim territorial ini semakin menjalar. Amerika Serikat hadir dalam konflik Laut China Selatan sebagai pihak yang meresolusikan konflik perairan Laut China Selatan dengan tujuan mendominasi kekuatannya kembali di Asia Tenggara terkhusus Indonesia.

Keamanan Maritim menjadi titik awal dalam pemicu kehadiran Amerika Serikat dalam perairan Laut China Selatan. Keamanan maritim yang menjadi sabagai poros dalam maritim dunia dirasa belum diimplementasikan secara paripurna, melihat klaim sepihak dari China, atas sembilan garis putus-putus yang dirasa China sebagai warisan leluhurnya. Aturan secara teori keamanan maritim yang mengacu kepada UNCLOS 1982, belum dengan maksimal bisa diaplikasikan. *United Nations Convention for the Law of the Sea* tidak pernah mengakui apa yang diklaim oleh China. Namun nyatanya aturan dari internasional tidak begitu dihiraukan oleh negara China, fakta tersebut tetap membuat China tidak mengubah sembilan garis putus-putus yang diakuinya.

Aturan hukum laut internasional dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982, memiliki regulasi bahwa sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawah laut territorial [Pasal 2(2)] atau dalam perairan kepulauan [Pasal 49(2)], dimana tunduk kepada aturan yang dimiliki oleh negara pantai. Dalam aturan tersebut bertentangan dengan yang diutarakan oleh China, karena China tidak mengakui seutuhnya kedaulatan wilayah negara pantai lain. Selanjutnya negara yang berdaulat berhak mengeksplorasi terhadap kekayaan yang terdapat dalam zona ekonomi eksklusif [Pasal 56(1)]. Melihat konflik maritim territorial yang terjadi Amerika Serikat menjunjung tinggi aturan internasional terhadap kedaulatan Lautan China Selatan. Hal itu bertentangan dengan sejarah

China yang mengklaim sembilan garis putus-putus yang dimilikinya. Amerika Serikat selalu menyuarakan kepada negara-negara yang beririsan dengan Laut China Selatan. Ketika Wakil Presiden Kamala Harris datang pada pertemuan Asean di Jakarta. Kehadiran Kamala Harris bentuk komitmen Amerika Serikat terhadap Indo – Pasifik dan dukungannya terhadap pertumbuhan Asean. Wakil Presiden Kamala Harris menekankan untuk kebebasan Laut China Selatan dan semua konflik dalam perairan tersebut harus dipecahkan secara damai. Wakil Presiden Kamala Harris melakukan pertemuan bilateral ketika di Jakarta bersama Presiden Ferdinand Marcos dan mengutarakan serta menggaris bawahi pentingnya pada ketetapan hukum internasional, serta Amerika Serikat menentang kepada keputusan sepihak terhadap Laut China Selatan (Readout of Vice President Harris’s Trilateral Meeting with President Marcos of the Philippines and Prime Minister Kishida of Japan | The White House,).

Amerika Serikat ikut serta dalam konflik Laut China Selatan tidak terlepas dari kepentingan nasional yang dimilikinya. Semua negara memiliki kepentingan yang dibawa dalam setiap permasalahan yang ada, termasuk Amerika Serikat. Konsep kepentingan nasional muncul pertama kali oleh Hans Morgenthau dalam *The Primacy of the National Interest*. Maksud dari kepentingan nasional merupakan sebagai bentuk perlindungan secara fisik, politik, dan identitas budaya dalam melakukan pertahanan menghadapi ancaman dari negara lain. Dalam dunia internasional banyak negara bersaing untuk merebut dominasi. Bagi sebagian negara menjadi syarat mutlak dan standar minimum untuk mendapatkan kekuasaan yang membuat keberlangsungan dalam hidup negaranya. Dengan hal demikian negara melakukan tindakan apa saja dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Baik hal tersebut dalam kepentingan ekonomi, kepentingan pertahanan, maupun kepentingan tatanan dunia. Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional yang besar dalam Laut China Selatan. Kepentingan nasional Amerika Serikat dalam prioritas utama Presiden Joe Biden mengembalikan posisi Amerika Serikat di dunia internasional dan membentuk aliansi-aliansi kuat berbagai negara demokrasi. Amerika Serikat

memiliki harapan besar untuk semakin kuat di Asia Tenggara. Melihat kemesraan yang terjadi antara Indonesia dengan China membuat Amerika Serikat geram (Yanyan Mochamad Yani). Hubungan Indonesia China memiliki kedekatan dalam berbagai aspek. China berupaya memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh negara Indonesia, salah satu yang terdekat merupakan dengan dibuatnya Kereta Cepat Indonesia China. Amerika Serikat tidak tinggal diam terhadap *major power* yang dimanifestasikan oleh China. Terutama ditambah ketika kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Decatur berlayar di Laut China Selatan, kementerian pertahanan China memberikan peringatan kepada kapal Amerika Serikat untuk meninggalkan perairan tersebut.

Secara letak geografis posisi Laut China Selatan cukup jauh dari Amerika Serikat namun Amerika Serikat merupakan aktor yang diperhitungkan dalam konflik di perairan Laut China Selatan. Posisi Laut China Selatan yang strategis sebagai jalur pelayaran internasional merupakan salah satu alasan Amerika Serikat tetap ingin kedaulatan Laut China Selatan, menggunakan dasar aturan internasional. Selain itu Amerika Serikat menyatakan keterlibatannya dalam Laut China Selatan atas dasar kebebasan navigasi kapal dalam perairan internasional yang diklaim sepihak oleh China. Sehingga Amerika Serikat mulai menggeser pasukannya ke Asia Pasifik dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara di Asia Tenggara (Bidara et al, 2018)

Atas dasar konflik maritim territorial dan kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu fokus dalam kebijakan luar negeri. Amerika Serikat memiliki kebijakan luar negeri dimana dalam situasi menghadapi negara dan unit politik internasional lainnya. tujuannya untuk mencapai kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh suatu pemerintahan negara memiliki kepentingan nasional masyarakatnya, tetapi kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan oleh siapa yang memimpin negara tersebut. Menjadi hal yang menarik setiap perguliran kepemimpinan di Amerika Serikat, kebijakan luar negeri terhadap Laut China Selatan tetap berlangsung secara

berkelanjutan. Pandangan Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitas agar mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternal, lebih dalamnya lagi kebijakan luar negeri ditujukan untuk keberlangsungan hidup suatu negara. Kepentingan nasional Amerika Serikat untuk mendominasi dan melanggengkan kekuasaannya di Asia Pasifik, selain melanggengkan kekuasaan Amerika Serikat menandang jelas bahwa peran Laut China Selatan cukup vital untuk pelayaran internasional dan sangat berdampak terhadap jalur perdagangan Amerika Serikat. Beberapa faktor eksternal dimana Laut China Selatan beririsan dengan negara aliansi Amerika Serikat, sehingga kehadiran klaim sepihak dari China seperti “mengusik” bagi Amerika Serikat. Intervensi Amerika Serikat merupakan bukti *status quo* kebijakan terhadap Laut China Selatan yang harus berpegang kepada aturan internasional. Langkah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan mulai mengalihkan pasukannya di Asia Pasifik, mengadakan latihan militer bersama seperti salah satunya Garuda Shield untuk memperkuat hubungan dengan kawasan Asia Pasifik. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sudah menjadi orientasi dalam prioritas kepentingan negara, komitmen, serta aksi terhadap perilaku sepihak dari China (Mochamad Yani).

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan, tidak hanya melibatkan aktor di wilayah tersebut. Amerika Serikat yang terletak jauh dari wilayah perairan Laut China Selatan, ikut terlibat dalam konflik tersebut. Dinamika yang terjadi di Laut China Selatan masih menjadi tumpang tindih. Daerah yang memiliki luas wilayah sebesar 3 juta kilometer persegi, di sebelah utara terletak diantara pantai tiongkok dan Taiwan, di sebelah barat terdapat pantai-pantai negara Asia Tenggara, di sebelah timur terdapat pulua-pulau filipina, serta di sebelah selatan terdapat Indonesia. Laut China Selatan beririsan dengan negara Brunei Darussalam, China, Filipina, Vietnam, Malaysia, semuanya memiliki klaim atas kedaulatan negaranya. China melakukan klaim sepihak atas dasar historis yang dimilikinya, sedangkan negara-negara lain memiliki klaim atas dasar geografis yang mengacu kepada *United Nation Convention on the Law of the Sea* (Schofield, 2016) Laut China

Selatan memiliki posisi strategis, dimana sebagai jalur perdagangan internasional dan sebagai jalur penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Perairan Laut China Selatan merupakan jalur tersibuk di dunia. Selain sebagai jalur perdagangan dan jalur penghubung Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Laut China Selatan menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah (Sulistyani et al, 2021).

Nilai strategis yang dimiliki oleh Laut China Selatan, membuat setiap negara memiliki klaim atas wilayah perairan tersebut dengan tujuan kepentingan nasional negaranya. Setiap negara melakukan manuver politik untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, seperti China dengan membentuk *nine dash line*, serta pengajuan gugatan terhadap China kepada Pengadilan Arbitrase Permanen PBB, serta perilaku asertif dari China dengan mendirikan pembangunan pulau-pulau serta kehadiran militernya dalam Laut China Selatan. Dinamika yang terjadi di Laut China Selatan menjadi peluang bagi *major power* Amerika Serikat ikut andil dalamnya. Amerika Serikat hadir dalam bentuk kekuatan militernya dengan meningkatkan intensitas *Freedom of Navigation Operation*. Amerika Serikat merasakan China sudah mulai berani menggeser kekuatannya, ditambah China melakukan sinergitas dengan negara-negara yang berkonflik di Laut China Selatan. Menjadi peluang Amerika Serikat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya melalui kebijakan luar negeri terhadap konflik Laut China Selatan.

China merupakan negara Asia yang muncul sebagai kekuatan baru di internasional. Tentu ada beberapa Alasan mengapa China bisa menjadi kekuatan baru, salah satunya China membentuk *image building* untuk menjadi negara *rising power* dengan membentuk *new security concept* yakni menjadi mitra yang baik bagi negara-negara disekitarnya. Selain itu China membawa *peaceful rise* dalam setiap kebijakan luar negerinya (Alunaza, 2021). Kondisi yang berlawanan dalam beberapa sektor China menjalin hubungan yang baik dengan membantu perekonomian negara lain, namun disisi lain China melakukan tindakan yang memicu banyak aktor dalam konflik Laut China Selatan.

Laut China Selatan sudah mulai bergeser dari konflik antar negara *claimant* berevolusi menjadi konfrontasi antara negara China dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut tentu ingin mendominasi di dunia internasional, terkhususnya di Asia Pasifik. Amerika Serikat sebagai negara kuat dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Konflik Laut China Selatan menjadi peluang bagi Amerika Serikat untuk memuluskan kebijakan luar negerinya. Pasca perang dingin Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal di dunia. Menyanandang sebagai negara paling kuat, Amerika Serikat tidak mau diatas angin. Hal ini yang mendorong Amerika Serikat untuk mengkaji kekuatannya. Salah satunya Amerika Serikat tetap menunjukkan kekuatannya, dengan mengintervensi masalah yang ada, walaupun hal tersebut jauh dari wilayah negaranya. Bentuk unjuk kekuatan tersebut dalam rangka Amerika Serikat memberikan *deterrence* kepada kompetitornya. Awalnya Amerika Serikat tidak begitu memperhatikan Asia Pasifik, karena dirasa tidak mengancam kepentingan nasional negaranya. Seiring berjalannya waktu pergeseran politik internasional semakin tumbuh, ditandai dengan hadirnya *middle power* dan *major power* berbagai level kawasan. Perkembangan terjadi dengan signifikan di Asia Pasifik, terutama ketika daerah tersebut menjadi aktivitas jalur internasional dan jalur perdagangan. Hadirnya China sebagai kekuatan baru dengan berbagai aspeknya, membuat Amerika Serikat mengalihkan kembali fokusnya di Asia Pasifik. Amerika Serikat memiliki peran fundamental dalam sistem internasional, sebagai negara super power Amerika Serikat berperan sebagai polisi dunia. Dalam menjaga ketertiban dunia, Amerika Serikat sering melibatkan dirinya dalam konflik yang ada (Gerstl, 2012).

Amerika Serikat dalam kepemimpinan Joe Biden memiliki kebijakan luar negeri dengan prioritas utama yakni akan hak asasi manusia, mempromosikan demokrasi, kesehatan, perubahan iklim, dan yang lebih penting ialah memperkuat hubungan dengan aliansi di Asia Pasifik untuk membatasi kekuatan China (Ihsan, 2022). Amerika Serikat melakukan sinergitas dengan Filipina melalui Anthony Blinken dalam menghadapi China di Laut China Selatan. Amerika Serikat juga menjalin kerjasama dengan

Inggris dan Australia dalam sektor pertahanan dan keamanan yang salahsatu tujuan geopolitiknya adalah untuk membendung China di Asia Pasifik. Strategi Joe Biden merupakan upaya membatasi China dalam kepemimpinan di kawasan regional Asia Pasifik. Menjadi prioritas bagi Amerika Serikat adalah *Navigation of Freedom*, sehingga mengadakan aliansi terhadap negara yang beririsan konflik di Laut China Selatan untuk membenndung klaim sepihak dari China atas *nine-dash line*.

Amerika Serikat memiliki upaya besar dalam kepentingan nasionalnya, untuk mengimbangi kekuatan China di Asia Pasifik. Kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhdapa berbagai negara merupakan bentuk menangkal kekuatan dominasi China. Amerika Serikta tidak hanya fokus dalam aspek keamanan untuk mengungguli China, Pemerintahan Joe Biden mulai memiliki rencana untuk mengembangkan terkait teknologi, baik itu pengembangan kereta cepat ataupun kendaraan elektrik yang saat ini menjadi keunggulan China. Bahkan Amerika Serikat mulai melakukan pola yang dilakukan China, seperti dengan pendekatan diplomatis, budaya, dan ekonomi, selain itu Amerika Serikat mulai meningkatkan perekonomian nasionalnya untuk menghadapi China (E. Matondang, 2021). Amerika Serikat memandang hubungan China dengan negara di Asia Pasifik salah satunya Indonesia, melihat kedekatan tersebut, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Terutama Indonesia bagian penting bagi Amerika Serikat, karena Indonesia sebagai wilayah strategis, populasi yang besar dan sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia (HUGH R. MCASLAN, 2004). Muncul Amerika Serikat sebagai *major power* di Laut China Selatan merupakan dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya. Amerika Serikat tidak mau ada yang menandingi dominasinya di dunia internasional (Suwarti Sari & Yanyan Mochamad Yani, 2017).

KESIMPULAN

Laut China Selatan sebagai wilayah strategis dengan penuh dinamika politik. Baik negara yang beririsan langsung dengan perairan Laut China Selatan ataupun yang tidak beririsan secara langsung seperti Amerika Serikat. Laut China Selatan menjadi jalur perdagangan dan pelayaran

internasional paling sibuk di dunia. Sehingga banyak negara yang bergantung kepada Laut China Selatan atas kepentingan nasionalnya.

China sebagai kekuatan baru di Asia, hadir dalam konflik dengan beberapa aktor di perairan Laut China Selatan. Klaim sepihak dengan warisan leluhur atas *nine-dash line* yang dilakukan China membuat *major power* lain seperti Amerika Serikat ikut andil dalam konflik Laut China Selatan. Amerika Serikat sejatinya tetap memiliki keinginan untuk melanggengkan kekuasaannya di dunia internasional. Terkhusus Amerika Serikat ingin mendominasi kekuatan di Asia Pasifik, salah satu jalan dalam hal tersebut dengan mengintervensi masalah Laut China Selatan. Aktivitas yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam membendung *Raising Chinese*. Dapat dilihat negara yang mengklaim terhadap Laut China Selatan seperti Indonesia tetap melakukan interaksi harmonis dengan China. Sehingga Amerika Serikat tidak tinggal diam terhadap sinergitas negara-negara dengan China.

Amerika Serikat sebagai *major power* memiliki kepentingan nasional dalam membendung kekuatan China. Konflik Laut China Selatan menjadi kesempatan bagi Amerika Serikat untuk berpeluang masuk mendominasi Asia Pasifik. Terutama peran Laut China Selatan vital baik dari jalur pelayaran maupun jalur perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza, H. (2021). *Perspektif Baru Politik Luar Negeri China dalam Konstelasi Politik Global: Resensi Buku*.
- Bidara, M. A., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). *KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN*.
- Countries & Regions | United States Trade Representative*. (n.d.). Retrieved October 17, 2023, from <https://ustr.gov/countries-regions>
- Gerstl, A. (2012). *Book Review: Yahuda, M. (2011). The International Politics of the Asia-Pacific (Third Edition)*. <https://doi.org/10.4232/10.ASEAS-5.1-15>
- HUGH R. MCASLAN, M. R. (2004). *US Foreign Policy towards Indonesia*.

- Ihsan, R. (2022). Joe Biden's Foreign Policy: What to Expect from the New United States President. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18(1), 88–98. <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.4514.88-98>
- Matondang, E. (2021). *PROYEKSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT ERA PEMERINTAHAN BIDEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DIPLOMASI INDONESIA*.
- Matondang, S. A., Hardiyansyah, M. R., & Nababan, S. A. (2022). History and Effect of South China Sea Conflict in Southeast Asia Political Stability after World War II. *Historical Studies Journal*, 6(1), 18–32. <http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>
- Menteri Perdagangan AS Kunjungi China, Bahas Upaya Peningkatan Bisnis*. (n.d.). Retrieved October 14, 2023, from <https://www.voaindonesia.com/a/menteri-perdagangan-as-kunjungi-china-bahas-upaya-peningkatan-bisnis/7243356.html>
- Mochamad Yani, Y. (n.d.). *Politik Luar Negeri*.
- Pengaruh Tiongkok dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan serta Dampaknya terhadap Indonesia*. (2014).
- Priorities | The White House*. Retrieved October 15, 2023, from <https://www.whitehouse.gov/priorities/>
- Putri, S., & Maarif, D. (2019). Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia-Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo. In *Jurnal Kajian Lemhannas RI*. www.matamatapolitik.com
- Readout of Vice President Harris's Trilateral Meeting with President Marcos of the Philippines and Prime Minister Kishida of Japan | The White House*. (2023). <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/09/07/readout-of-vice-president-harriss-trilateral-meeting-with-president-marcos-of-the-philippines-and-prime-minister-kishida-of-japan/>
- Ruyat, Y. (2017). *PERAN INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH LAUT NATUNA DAN MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN*.
- Schofield, C. (2016). Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South China Sea. *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions (Lectures, Workshops, and Proceedings of International Conferences)*, .
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia di tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan di bawah Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Politika Dinamika*

Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 12(1), 85–103.
<https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>

Suwarti Sari & Yanyan Mochamad Yani. (2017). REVITALISASI HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DI ASIA PASIFIK. *Dinamika Global*, 2(2), 1–3.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v2i02.35>

Yanyan Mochamad Yani. (n.d.). *MAKNA STRATEGIS KERJASAMA MILITER RI-CINA*.